

**IMPLEMENTASI STRATEGI ORGANISASI NON PEMERINTAH  
DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG PADA PEKERJA MIGRAN ASAL LAMPUNG TIMUR  
(Studi Pada Serikat Buruh Migran Indonesia DPC Lampung Timur)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**CHINDY DIAN NOVIAWATI  
NPM 1746041008**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI STRATEGI ORGANISASI NON PEMERINTAH DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL LAMPUNG TIMUR (Studi pada Serikat Buruh Migran Indonesia DPC Lampung Timur)**

**OLEH:**

**CHINDY DIAN NOVIAWATI**

Langkanya lapangan pekerjaan di daerah menyebabkan seseorang bermigrasi, biasanya seseorang memutuskan untuk migrasi karena didorong oleh faktor ekonomi. Migrasi pekerja yang terjadi telah menjadi penyumbang angka yang cukup tinggi bagi pembangunan ekonomi, dimulai dari negara asal maupun negara tujuan. Banyaknya minat menjadi PMI dipicu oleh lapangan kerja yang relatif banyak dengan penghasilan yang menjanjikan dibanding dengan penghasilan yang mereka dapatkan jika bekerja di dalam negeri. Tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan jumlah pengiriman pekerja migran yang dikatakan cukup banyak. Peran lembaga non pemerintah sangat dibutuhkan, agar lembaga ini semakin mampu mendorong berbagai pihak memerangi perdagangan orang.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data didapatkan dengan wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi organisasi non pemerintah dalam mengatasi TTPO di Lampung Timur, dikatakan baik, hal ini ditunjukkan dengan dengan berjalannya pelaksanaan program di SBMI Lampung Timur, dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang selalu dilaksanakan, anggaran yang didapatkan untuk menjalankan program didapat dari SBMI Pusat dan program berjalan sesuai dengan prosedur dalam penerapan yang ada di SBMI Lampung Timur. Berjalannya program SBMI Lampung Timur inilah yang dapat mengurangi jumlah TPPO pada PMI asal Lampung Timur.

**Kata Kunci: Perdagangan orang, Prosedur, Program**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION STRATEGIES IN OVERCOMING THE CRIME OF TRAFFICKING IN INDONESIAN MIGRANT WORKERS FROM EAST LAMPUNG (Study of the East Lampung DPC Indonesian Migrant Workers Union)**

**BY:**

**CHINDY DIAN NOVIAWATI**

*The scarcity of job opportunities in the area causes people to migrate, usually someone decides to migrate because they are driven by economic factors. The migration of workers that has occurred has contributed quite a high number to economic development, starting from countries of origin and destination countries. The large number of interests in becoming PMI is triggered by the relatively large number of job opportunities with promising income compared to the income they earn if they work domestically. The crime of human trafficking has received attention from various parties throughout the world, including Indonesia, where the number of migrant workers sent is said to be quite large. The role of non-governmental organizations is very much needed, so that these institutions are increasingly able to encourage various parties to fight human trafficking.*

*The type of research used in this research is descriptive type with a qualitative approach, data sources are obtained through interviews, documentation. The results of this research show that the implementation of non-governmental organization strategies in overcoming TTPO in East Lampung is said to be good, this is shown by the ongoing implementation of the program at SBMI East Lampung, with supporting activities that are always carried out, the budget obtained to run the program is obtained from SBMI The center and programs run in accordance with existing standard procedures at SBMI East Lampung. The running of the East Lampung SBMI program is what can reduce the number of TPPO among PMI from East Lampung.*

**Keywords: Human trafficking, Procedure, Program**

**IMPLEMENTASI STRATEGI ORGANISASI NON PEMERINTAH  
DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG PADA PEKERJA MIGRAN ASAL LAMPUNG TIMUR  
(Studi Pada Serikat Buruh Migran Indonesia DPC Lampung Timur)**

Oleh

**Chindy Dian Noviawati**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI STRATEGI ORGANISASI  
NON PEMERINTAH DALAM MENGATASI  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
PADA PEKERJA MIGRAN ASAL LAMPUNG  
TIMUR (Studi Pada Serikat Buruh Migran  
Indonesia DPC Lampung Timur)**

Nama mahasiswa : **Chindy Dian Noviawati**

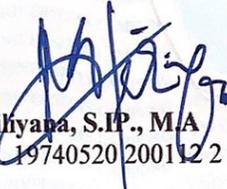
Nomor Pokok Mahasiswa : 1746041008

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

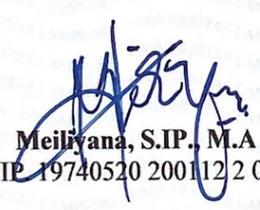
**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Meiliyana, S.IP., M.A.**  
NIP. 197405202001122002

  
**Ita Prihanika, S. Sos., M.A.**  
NIP. 198406302015042002

2. Ketua Jurusan Administrasi Negara

  
**Meiliyana, S.IP., M.A.**  
NIP. 197405202001122002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

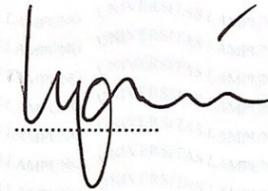
Ketua : **Meiliyana, S.IP., M.A.**



Sekretaris : **Ita Prihantika, S. Sos., M.A.**



Penguji Utama : **Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M. Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si**  
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **17 Oktober 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2023  
Yang membuat pernyataan,



Chindy Dian Noviwati  
NPM. 1746041008

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Untoro pada tanggal 27 November 1998, merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan Ayah Alfian dengan Ibu Eni Bagawati. Penulis bertempat tinggal di Jl Kelapa II, RT 013/RW 005, Desa Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Penulis menempuh pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) PKK Wates (2004-2005), Sekolah Dasar di SDN 1 Wates (2005-2011), Sekolah Menengah Pertama di MTS Dinniyah Putri Lampung (2011-2014), dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Metro (2014-2017). Pada akhir tahun 2017, penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung melalui jalur seleksi Pararel.

Selama menimba ilmu di Universitas Lampung, penulis pernah tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Penulis juga turut aktif di organisasi HIMAGARA sebagai anggota bidang Minat dan Bakat. Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di awal tahun 2020 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di pertengahan tahun 2020 di Desa Seputih jaya, Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih selama 40 hari.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku:

Terimakasih kepada diri sendiri, sudah mampu yakin bahwa Allah ada dan segalanya akan baik-baik saja. Terimakasih sudah berusaha berjalan dan berjuang sejauh ini.

Kedua orang tuaku tercinta: **Ayah Alfian dan Ibu Eni Bagawati** yang dengan tulus merawatku, membesarkanku dengan penuh kasih sayang, mendidik, memotivasi, dan mendoakanku.

Terimakasih atas segala pengorbanan yang selalu kalian berikan untukku.

Adik-adikku tersayang: **Sendi Bima Setiawan, Danesh Satria Ardhani, dan Amelia**

Terimakasih kalian telah menjadi penyemangatku, selalu mendukungku, dan menghiburku dengan canda dan tawa.

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan serta motivasi dalam segala prosesku.

Para pendidik tanpa tanda jasa serta Almamater tercinta,

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT., atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini telah terselesaikan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Organisasi Non Pemerintah Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Asal Lampung Timur (Studi pada Serikat Buruh Migtran Indonesia DPC Lampung Timur)”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Meiliyana, S. IP., M. A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung dan selaku dosen pembimbing I Terima kasih atas saran, nasihat, bimbingan selama proses pengerjaan skripsi, waktu, serta kesabaran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih dan sangat terbantu sekali dengan proses bimbingan serta segala motivasi yang diberikan.
2. Ibu Ita Prihantika, S. Sos., M.A. selaku dosen Pembimbing II. Terima kasih atas saran, nasihat, bimbingan selama proses pengerjaan skripsi, waktu, serta

kesabaran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih dan sangat terbantu sekali dengan proses bimbingan serta segala motivasi yang diberikan.

3. Dr. Susana Indriyati, S.IP., M. Si. selaku dosen pembahas dan penguji yang telah banyak membantu perbaikan melalui kritik, saran dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga akhir.
4. Bapak Simon Sumanjoyo H, S. A.N., M. PA. selaku dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, yang telah mewariskan ilmunya dengan penuh kesabaran, memberi motivasi, dan banyak membimbing penulis dalam menempuh pendidikan;
7. Mba Wulan sebagai staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu sabar dalam memberikan pelayanan dan membantu segala hal yang berkaitan dengan administrasi selama penyusunan skripsi hingga selesai;
8. Bapak Mujianto selaku Ketua dan anggota yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu SBMI Lampung Timur, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk dapat melakukan wawancara dan memberikan informasi kepada penulis dalam menunjang skripsi penulis.
9. Kedua orang tua penulis Ayahku Alfian dan Ibu ku tersayang Eni Bagawati. Yang selalu memberi support baik doa maupun biaya, serta kasih sayang yang tiada terkira.
10. Adik-adikku tersayang, Sendi Bima Setiawan, Danesh Satria Ardhani dan Amelia yang selalu mendukungku dan membawa kebahagiaan disetiap hari.
11. Sahabat 24/7 Margareta Linda Puji Rahayu yang selalu memberikan motivasi, semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi. Yang selalu bersedia direpotkan kapanpun dan dimanapun.
12. Sahabat karib Tika Oktavia, Meliza Ega, Anisa Dwi Artha, Tyas Surya yang selalu memberikan semangat dan berbagi cerita sehingga membuat penulis semangat dalam mengerjakan skripsi.

13. Sahabat Kost Pink Berhantu Lipur, Acil, Dinur yang selalu memberi candaan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
14. Sahabat dirumah Mela, Meta, Niken, Wanda dan Munis yang selalu selalu memberikan candaan dan berbagi cerita menyenangkan sehingga membuat penulis semangat dalam mengerjakan proses skripsi.
15. Sahabat sedari SMP si bocil Dita, dan Bunda Vivi terimakasih telah membersamai penulis dan memotivasi sampai dengan detik ini.
16. Teman seperjuangan angkatan 2017 (ANGKASA) Elda Zulvitasari, Yola Maldini, Rika Selvina, Putri NP, Mia Pratama dan Ira Andriyani yang selalu saling memberikan motivasi dan telah banyak membantu dan memberikan kenyamanan dalam pertemanan selama proses skripsi.

Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi mahasiswa FISIP dan bagi siapapun yang telah membacanya

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Tinjauan Tentang Organisasi Publik .....	13
2.2.1 Pengertian Organisasi Publik.....	13
2.2.2 Jenis organisasi Publik.....	14
2.3 Organisasi Non Pemerintah (NGO) .....	14
2.4 Tinjauan Tentang Strategi .....	16
2.4.1 Pengertian Strategi.....	16
2.4.2 Peranan Strategi .....	16
2.4.3 Fungsi Strategi.....	17
2.5 Tinjauan Tentang Manajemen Strategi .....	17
2.6 Tinjauan Implementasi Strategi .....	18
2.6.1 Konsep Implementasi Strategi .....	19
2.7 Perdagangan Orang .....	23
2.8 Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	24
2.9 Kerangka Pemikiran.....	24

### **III. METODE PENELITIAN**

3.1 Tipe Penelitian.....	27
3.2 Fokus Penelitian .....	27
3.3 Lokasi Penelitian .....	28
3.4 Sumber Data .....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.6 Teknik Analisis Data .....	31
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	32

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur .....	36
4.1.1 Jumlah penduduk.....	36
4.1.2 Kondisi perekonomian.....	38
4.1.3 Profil SBMI .....	39
4.2 Hasil Penelitian .....	41
4.2.1 Program SBMI.....	42
4.2.2 Anggaran SBMI.....	52
4.2.3 Prosedur SBMI .....	55
4.3 Pembahasan.....	65
4.3.1 Program SBMI.....	65
4.3.2 Anggaran SBMI.....	70
4.3.3 Prosedur SBMI .....	72

### **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran... ..	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Penempatan PMI di Luar Negeri Provinsi 2016-2020.....	2
Gambar 2. Kerangka Pemikiran .....	26
Gambar 3. Wawancara ketua SBMI Lampung Timur.....	35
Gambar 4. Struktur Organisasi SBMI Lampung Timur.....	41
Gambar 5. Pemulangan Jenazah PMI Asal Lampung Timur .....	45
Gambar 6. Pemutaran Film BYE.....	48
Gambar 7. Sosialisasi TPPO tahun 2022.....	50
Gambar 8. Penyerahan dana Pemberdayaan.....	51
Gambar 9. Sosialisasi TPPO tahun 2023.....	52
Gambar 10. Penanganan Kasus Pekerja Migran .....	60
Gambar 11. Pengorganisasian PMI dan Anggota Keluarganya.....	61
Gambar 12. Pendidikan dan Pelatihan .....	62
Gambar 13. Media Informasi Anggota SBMI .....	63
Gambar 14. Media Informasi Anggota SBMI .....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah PMI Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2021 .....	4
Tabel 2. Kasus kekerasan dan TPPO di Provinsi Lampung 2021 .....	5
Tabel 3. Informan Peneliti .....	30
Tabel 4. Dokumentasi.....	31
Tabel 5. Jumlah TPAK/TPP Lampung Timur 2020-2022 .....	37
Tabel 6. Kasus/Korban PMI 2022-2023 Asal Lampung Timur .....	44
Tabel 6. Ruang Lingkup SBMI Lampung Timur .....	36
Tabel 7. Anggaran Kegiatan SBMI 2020-2023 .....	55
Tabel 8. Anggaran Kegiatan SBMI dan MFA .....	55
Tabel 9. Anggaran Kegiatan SBMI Kalina Mitra .....	56
Tabel 10. Anggaran Kegiatan SBMI Pusat dan SBMI Lampung Timur .....	57

## I. PENDAHULUAN

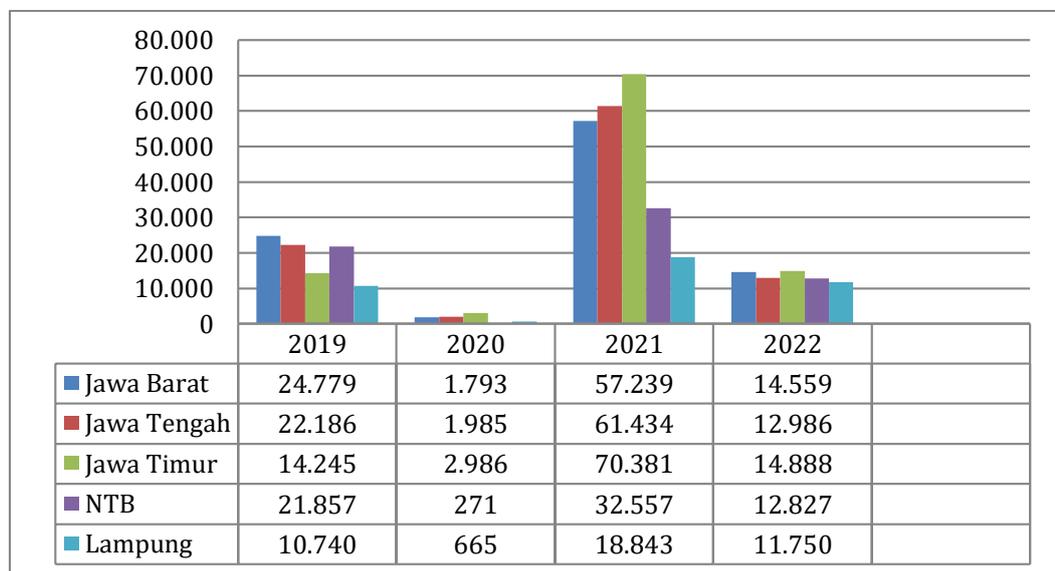
### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk didapati semakin meningkat, terlihat dari beberapa isu yang beredar dan mengawatirkan bagi negara di dunia yang mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk dalam aspek pembangunan diawali dengan aspek ekonomi sampai dengan sosial yang dapat meningkatkan mutu pembangunan dengan kualitas sumber daya manusia yang didorong dari tingginya angka penduduk yang tidak dapat distabilkan. Bertambahnya jumlah penduduk di setiap tahunnya juga harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mumpuni, agar mampu bersaing dalam dunia kerja untuk mendukung proses pembangunan nasional di bidang ekonominya.

Adanya pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Namun, keadaan penduduk di Indonesia yang semakin padat berakibat minimnya lapangan pekerjaan ini lah yang membuat masalah dalam pembangunan ekonomi. Hal tersebut disebabkan adanya timpang tindi antara kesempatan kerja dengan jumlah penduduk yang ada. Pembangunan yang tersedia tidak mengatasi masalah pengangguran yang semakin meningkat, terhitung sejak tahun 2019 hingga 2022 dampak yang dirasakan yaitu kemiskinan, pengangguran dan migrasi ke berbagai negara.

Langkanya lapangan pekerjaan menyebabkan seseorang bermigrasi. Biasanya seseorang memutuskan untuk migrasi karena didorong oleh faktor ekonomi. Dengan kondisi tersebut maka banyak masyarakat Indonesia yang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Mereka berfikir bahwasanya menjadi PMI merupakan solusi yang tepat dan mereka berfikir bahwa menjadi PMI adalah suatu pekerjaan yang menjanjikan untuk memenuhi harapan dan mendapatkan kesejahteraan.

Migrasi pekerja yang terjadi telah menjadi penyumbang angka yang cukup tinggi bagi pembangunan ekonomi, dimulai dari negara asal pekerja maupun negara yang bersangkutan menerima para pekerja tersebut. Banyaknya minat menjadi PMI dipicu oleh lapangan kerja yang relatif banyak dengan penghasilan yang menjanjikan dibanding dengan penghasilan yang mereka dapatkan jika bekerja di dalam negeri. Mereka berharap bahwasanya keputusan untuk bekerja di luar negeri sebagai PMI dapat menjadi awal yang baik untuk kelangsungan perekonomiannya. Gambar dibawah merupakan jumlah PMI yang bekerja ke luar negeri dari beberapa Provinsi yang ada di Indonesia:



Gambar 1. Jumlah Penempatan PMI di Luar Negeri Berdasarkan Provinsi Periode 2019-2022.

Sumber: [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id), 2023

Meninjau gambar di atas dapat dilihat jumlah PMI pada periode 2019-2022 yang berangkat ke luar negeri di setiap tahunnya terhitung cukup banyak, ini merupakan gambaran yang menganggap penting sebuah pekerjaan yang layak dan dibutuhkan bagi penduduk Indonesia. Provinsi Lampung menempati posisi lima besar dengan jumlah 14.052 orang yang didapati keberangkatannya keluar negeri sebagai pekerja migran.

Pada tahun 2020 dari setiap Provinsi mengalami penurunan terhadap penempatan pekerja migran, dikarenakan pandemi covid-19 yang

menyebabkan berkurangnya jumlah PMI yang akan berangkat ke luar negeri. Pengiriman PMI keluar negeri merupakan penyelenggaraan pengiriman tenaga kerja yang telah diselenggarakan oleh negara Indonesia. Dengan adanya PMI yang bekerja ke luar negeri menjadi upaya untuk mengurangi angka pengangguran dan kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia.

Sebagaimana UU No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia diterbitkan untuk melindungi PMI. Mengingat dari banyaknya pengiriman PMI ke luar negeri tidak adanya kesesuaian antara yang didapatkan oleh PMI, dengan adanya masalah yang seringkali dialami oleh pekerja migran seperti penempatan dan hak atas tenaga kerja. Banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja keluar negeri, pemerintah mendapatkan banyak tantangan, seperti banyaknya PMI yang berangkat secara langsung keluar negeri melalui jalan illegal atau non-prosedural dimana PMI yang akan pergi tidak mengikuti prosedur yang ada mereka biasanya memalsukan dokumen dan memanipulasi data.

Data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung PMI asal Lampung di dominasi pekerja informal yakni seperti asisten rumah tangga dan lain sebagainya dibanding dengan formal. Dari Januari hingga Oktober 2021 PMI asal Lampung mencapai 3.133 dengan jalur keberangkatan resmi yang terbagi atas pekerja informal sebanyak 2.466 orang dan formal 667 orang. Berikut jumlah PMI per Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sejak Januari hingga Oktober 2021 yaitu:

Tabel 1. Jumlah PMI Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2021

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Ket
1.	Lampung Timur	1.237	Orang
2.	Lampung Tengah	473	Orang
3.	Lampung Selatan	285	Orang
4.	Pesawaran	195	Orang
5.	Tanggamus	178	Orang
6.	Tulang Bawang	153	Orang
7.	Lampung Utara	148	Orang
8.	Bandar Lampung	142	Orang
9.	Pringsewu	76	Orang

10.	Tulang Bawang Barat	67	Orang
11.	Metro	65	Orang
12.	Way Kanan	56	Orang
13.	Mesuji	43	Orang
14.	Lampung Barat	20	Orang
15.	Pesisir Barat	3	Orang

Sumber: [kupastuntas.co.id](http://kupastuntas.co.id), 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Timur menduduki angka tertinggi dengan jumlah keberangkatan tercatat mencapai 1.237 ribu warga yang akan menjadi PMI, adapun jalur yang dipilih ialah 5 persen atau 500 orang melalui jalur ilegal dan sisanya melalui jalur legal. Jalur resmi yang digunakan ialah jalur yang melakukan koordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sedangkan jalur tidak resmi yang digunakan akan menjadi kendala bagi PMI dikarenakan saat terjadi masalah PMI tidak mendapatkan asuransi, tidak adanya pertanggungjawaban dari pihak manapun ([lampost.com](http://lampost.com). diakses 23 Mei 2022).

Pekerja Migran Indonesia lebih didominasi oleh perempuan pada tahun 2021 mencapai 55.815 jiwa sedangkan jumlah PMI laki-laki hanya 16.809 jiwa. Banyaknya PMI yang terdiri dari perempuan inilah yang beresiko tinggi terhadap ancaman kekerasan baik secara fisik, psikologi, seksual dan ekonomi. Salah satu contoh kasus yang menimpa seorang PMI perempuan asal Lampung yang dijanjikan calo dan akan diberangkatkan pada 15 Maret 2019 untuk dipekerjakan di salah satu salon kecantikan di Malaysia, namun kenyataannya ia dipekerjakan di sebuah tempat prostitusi yang disamarkan dengan nama panti pijat dan mengalami eksploitasi seksual dan kekerasan psikologis ([bp2mi.go.id](http://bp2mi.go.id). diakses 3 Juni 2022).

Tindak pidana perdagangan orang dikatakan berkembang dengan pesat sehingga menjadi sindikat lintas batas negara, hal ini disebabkan karena jalur komunikasi dan transportasi antar negara dianggap mudah untuk dilalui. Tindak pidana perdagangan orang umumnya terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi, pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan, serta sulitnya mengenyam pendidikan, sehingga lebih mudah para pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk memancing korban dengan modus untuk menjadi

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan dijanjikan akan diberikan bayaran yang tinggi serta kehidupan yang lebih baik. PMI yang tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana migrasi yang benar biasanya akan lebih mudah menjadi korban perdagangan orang, dan PMI keberangkatan illegal lah yang lebih rentan, karena kurangnya kesadaran dari PMI tersebut dan mereka hanya berfikir untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang.

Salah satu contoh adanya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi yaitu pada kasus kekerasan yang dialami oleh salah satu Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Lampung yang dikabarkan mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh majikannya yang terjadi di Malaysia. Perempuan yang berinisial S tersebut sudah menjadi tenaga migran secara ilegal sejak tahun 2018. Berdasarkan informasi yang ada perempuan tersebut berangkat pada tahun 2018 dan ditempatkan secara ilegal melalui seorang tetangganya (rri.co.id diakses pada 20 Desember 2020).

Tabel 2. Kasus kekerasan dan perdagangan orang di Provinsi Lampung pada Januari-Desember 2021

NO.	KASUS	JUMLAH
1.	Kasus pencabulan	93
2.	Kasus pemerkosaan	20
3.	Kasus eksploitasi seksual pada anak	21
4.	Kasus perdagangan perempuan	17
5.	Kasus kekerasan berbasis gender online	5
6.	Kasus eksibisionis	1
Total		140

Sumber: tribunlampung.co.id 2021

Tercatat sebanyak 140 kasus yang telah terjadi, di dalamnya terdapat perempuan pekerja migran dan anak di daerah Lampung yang rentan menjadi korban perdagangan orang, 17 dan 21 kasus merupakan kasus yang cukup banyak hal ini dikarenakan mayoritas pekerja migran merupakan sekelompok perempuan atau individu yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, dan mudah berpindah-pindah majikan hingga tidak terpantau lagi keberadaannya. Kerentanan pekerja migran dalam setiap tahapan migrasi dan berbagai

persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat bekerja dan kembali ke tanah air masih menjadi persoalan keseharian yang dialami oleh perempuan pekerja migran ([tribunlampung.co.id](http://tribunlampung.co.id)).

Selain pemerintah sebagai pelayan publik yang memberikan perlindungan HAM untuk warganya, adapun lembaga lain yang akan memberikan pelayanan seperti lembaga keagamaan, lembaga sosial maupun kelompok masyarakat sipil lainnya turut berusaha menanggulangi persoalan perdagangan orang yang dialami oleh pekerja migran Indonesia. Sampai saat adanya lembaga masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan pekerja migran di Indonesia yaitu salah satunya Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pun hadir di tengah masyarakat yang merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang merupakan wujud dari kepedulian dan kontribusi dari kondisi buruk serta banyaknya permasalahan yang dialami, adanya keterbatasan pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan serta minimnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada PMI. Dengan hadirnya lembaga-lembaga non pemerintah dengan strategi dan cara kerjanya yang diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi PMI. Pekerja migran memiliki hak asasi untuk mendapatkan penghidupan yang layak, perlakuan adil di mata hukum, kebutuhan harmonis sebagai manusia.

Adanya SBMI di tengah masyarakat membantu untuk memberikan informasi tentang hak dan kewajiban bagi para PMI, memberikan sosialisasi tentang tindak pidana perdagangan orang, melakukan sosialisasi tentang bagaimana migrasi yang baik dan benar, memberikan informasi tentang pentingnya surat perjanjian yang berkaitan dengan PMI, SBMI juga menyediakan buku bacaan seputar pekerja migran dan buku bacaan yang berkaitan hal-hal yang menyangkut PMI. SBMI telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi pekerja migran sesuai dengan UU No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, upaya tersebut ialah melakukan survei PMI yang akan bekerja dengan menganalisis penyebab migrasi dan kendala yang

dihadapi. Selanjutnya melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk PMI agar mengetahui hak dan kewajiban sebagai PMI, sehingga adanya pengetahuan bagi PMI yang akan berangkat. Berbagai upaya yang telah dilakukan SBMI sebagai tindakan dalam pencapaian tujuan dalam mengurangi maraknya perdagangan orang, namun masih terdapat angka yang tinggi dalam kasus perdagangan orang di wilayah Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Timur.

Hasil wawancara dengan Bapak Sukendar selaku salah satu Pengurus SBMI Lampung Timur yang mengungkapkan SBMI hadir untuk membantu memberikan informasi tentang hak dan kewajiban bagi para PMI, SBMI selalu berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana migrasi yang aman dan benar menurut prosedural, untuk mengoptimalkan fungsi penguatan layanan pemerintah daerah sesuai mandate UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia no 18 tahun 2017 melalui program *Migrant worker Resource Center (MRC)*. (wawancara bersama bapak Sukendar, 22 Juli 2022)

Peran lembaga non pemerintah sangat dibutuhkan, agar lembaga ini dapat mendorong berbagai pihak untuk memerangi perdagangan orang yang kian meningkat, dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang implementasi strategi lembaga non pemerintah dalam melindungi pekerja migran sebagaimana strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi dalam mencapai sasarannya strategi yang digunakan SBMI merupakan langkah yang akan digunakan untuk mengurangi terjadinya perdagangan orang dengan melakukan banyak sosialisasi mengenai pentingnya menjaga identitas diri. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Chandler dalam Umar (2010), bahwasanya strategi ialah suatu program untuk mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang maka dengan adanya strategi dapat menentukan langkah yang akan dicapai dalam tindak pidana perdagangan orang. Adanya sebuah strategi tentunya telah melewati perumusan strategi sebagai penjaring apakah strategi yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan kemudian akan diimplementasikan sesuai dengan target dan sasaran untuk mencapai tujuan strategi yang telah dirumuskan.

Adapun strategi SBMI Lampung Timur menurut bapak Sukendar diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan layanan pengaduan yang mampu melayani pengaduan PMI.
2. Memberikan pelayanan advokasi dan perlindungan hukum untuk memenuhi hak-hak PMI sejak pra, masa dan purna penempatan.
3. Melakukan pemberdayaan dan pembinaan PMI purna.
4. Bekerja sama dengan instansi terkait.

(wawancara dengan Bapak Sukendar, 13 September 2022)

Misi dan tujuan SBMI hanya akan tercapai jika diimplementasikan, sebab kunci kesuksesan dari manajemen strategi yaitu pada saat diimplementasikan strategi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh konsep menurut Wheelen dan Hunger dalam Ulfa (2018), implementasi strategi merupakan suatu proses pihak manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan pelaksanaan program, anggaran, dan prosedur. Pada SBMI Lampung Timur strategi yang telah diimplementasikan, dalam proses penerapannya melalui 3 elemen manajemen strategi dengan program, anggaran dan prosedur terdapat kekurangan, dimana dalam pelaksanaannya bahwa prosedur yang dilaksanakan tidak begitu berstruktur dan tidak tertulis sehingga kurang efektif, dalam pelaksanaannya koordinasi yang dijalankan itu dimulai dengan ketua SBMI Lampung Timur berkoordinasi dengan ketua sebelumnya tentang bagaimana sebuah prosedur dalam menjalankan program kemudian dilanjutkan pelaksanaan program oleh anggota SBMI Lampung Timur.

Implementasi strategi yang dijalankan harusnya dapat mewujudkan pelaksanaan yang secara lengkap. Untuk itu di dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian dengan judul “Implementasi Strategi Organisasi Non Pemerintah Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Asal Lampung Timur (studi pada Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung Timur)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi strategi serikat buruh migran Indonesia Lampung Timur dalam mengatasi perdagangan orang pada pekerja migran asal Lampung Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun rumusan masalah di atas didapati tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan implementasi strategi Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung Timur dalam mengatasi perdagangan orang pada pekerja migran asal Lampung Timur.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah wawasan keilmuan di dalam Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi strategi, serta Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian yang berkaitan selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi informasi dan memberikan rekomendasi bagi lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang terkait dalam pengelolaan Pekerja Migran Indonesia di Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Sakti (2019), yang berjudul *Peran International Organization of Migration (IOM) dalam Menanggulangi Perdagangan Orang di Indonesia* fokus penelitian ini ialah peran IOM dalam menanggulangi perdagangan orang di Indonesia yang terdapat mulai dari tahun 2009 hingga 2014 menjelaskan angka penurunan yang drastis bahwa perdagangan orang terutama wanita yang berumur 18 tahun lebih banyak dilakukan. Adapun hasil dari penelitian ini, mengkaji mengenai peran yang dilaksanakan IOM untuk menanggulangi perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2015-2018 yang ditinjau melalui teori *international organization*, karena dalam memberantas perdagangan orang yang dialami sampai saat ini pemerintah Indonesia belum bias memberikan penyelesaian permasalahan ini, dan dibutuhkan sebuah organisasi internasional yang dikaitkan dengan konsep *international organization*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi IOM telah melaksanakan berbagai upaya dalam menangani kasus perdagangan orang dan memberikan hasil yang nyata atas aksinya.

Penelitian kedua dari Pratiwi (2020), dengan judul *Upaya Indonesia dalam mengatasi masalah perdagangan manusia di Selat Malaka berfokus pada implementasi strategi*. Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah bekerja sama dengan tiga negara pesisir dalam kerja sama yang dikenal sebagai *Malacca Straits Patrols (MSP)*, dan juga memiliki kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat sebagai *User State*. Berbagai aktor negara terlibat dalam upaya ini, tetapi Indonesia juga menjalin kerja sama dengan *International Maritime Organization (IMO)* sebagai organisasi maritim internasional dan aktor dalam sektor keamanan negara pesisir.

Dalam upaya Indonesia untuk mengatasi perdagangan manusia di Selat Malaka, penelitian ini menggunakan strategi yang ditawarkan oleh *Friensendorf* dalam bukunya tentang penanggulangan perdagangan manusia. *Friensendorf* menjelaskan empat strategi, yaitu implementasi, kerja sama, penelitian dan evaluasi, serta pembentukan kelembagaan yang lebih baik, jaringan, dan evaluasi. Pada strategi implementasi, Indonesia telah mengadopsi hukum internasional menjadi hukum nasional, termasuk meratifikasi Protokol Palermo sebagai kerangka hukum internasional dalam mengatur perdagangan manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo dan mengimplementasikannya melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2007. Indonesia juga telah meratifikasi Deklarasi ASEAN tentang Perdagangan Orang, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak. Dalam strategi kerja sama, Indonesia telah menjalin berbagai kerja sama dengan negara-negara lain, mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia. Namun, strategi evaluasi tidak ditemukan dalam penelitian ini. Strategi terakhir adalah pembentukan lembaga khusus untuk penanganan perdagangan manusia di Selat Malaka.

Penelitian selanjutnya dari Tapon (2016), yang berjudul Strategi Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “*Migrant Care*” dalam upaya tindakan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Korban *Human Trafficking*”. Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilaksanakan oleh *Migrant Care* dalam membangun strategi komunikasi penanganan TKW korban *human trafficking* berjalan efektif yaitu dengan membentuk kelompok untuk bekerja sama dengan melakukan sosialisasi terhadap para korban PMI yang dilakukan secara khusus. Teori yang digunakan ialah menurut Heris (2016), yang mengungkapkan Strategi Komunikasi adalah salah satu cara untuk mengatur pelaksanaan sebuah proses komunikasi, mulai dari perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*implementation*) hingga evaluasi (*evaluation*) untuk mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi adalah salah satu aspek penting yang memungkinkan adanya proses akselerasi dan keberlanjutan suatu program pembangunan

khususnya pada pemasaran diperkuatnya dengan terlaksananya *Migrant Care* untuk penanganan pekerja migran memberikan harapan besar atas solusi serta menjadi senjata untuk memerangi kasus perdagangan orang. Strategi *Migrant Care* yaitu komunikasi dapat menjangkau berbagai pihak baik instansi pemerintah hingga lembaga sosial yang secara langsung terjun ke masyarakat terutama dalam penanganan kasus perdagangan orang.

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana implementasi strategi dan peran serta fungsi organisasi non profit dalam menanggulangi masalah perdagangan orang, selain itu dapat memberikan solusi dalam masalah tersebut, mendorong berbagai pihak memerangi perdagangan orang, agar dapat menurunkan angka perdagangan orang yang sebelumnya meningkat.

## **2.2 Tinjauan Tentang Organisasi Publik**

### **2.2.1 Pengertian Organisasi Publik**

Organisasi publik ialah suatu wadah untuk membuat adanya interaksi dengan tujuan yang sama. Adapun organisasi dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antar individu dalam mencapai tujuan bersama. Untuk kegiatan yang dilaksanakan memiliki sumber daya yang akan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya secara jelas. Organisasi publik merupakan suatu lembaga yang disediakan oleh pemerintah sebagai media untuk memberikan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah menyediakan suatu lembaga dengan membentuk sistem administrasi dan birokrasi yang baik agar menghasilkan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang nyata (Adiwilaga, 2018).

Adapun pendapat Mahmudi (2010), organisasi publik ialah sebuah lembaga yang akan melaksanakan kegiatan pelayanan, kegiatan ini merupakan bentuk upaya pemenuhan kebutuhan publik dan melaksanakan segala kegiatan pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan pelayanan kepada publik lembaga atau instansi yang bersangkutan dapat

menyelenggarakan pelayanan publik dan memperhatikan asas pelayanan publik sebagai berikut:

- a. Transparansi dalam pelayanan publik adalah ketika informasi yang diberikan mudah diakses oleh semua orang, jelas, dan dapat dimengerti dengan baik.
- b. Akuntabilitas dalam pelayanan publik berarti bahwa pelayanan yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Kondisional merujuk pada pemberian pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan baik pemberi maupun penerima layanan publik.
- d. Partisipatif adalah ketika pelayanan publik mendorong partisipasi masyarakat berdasarkan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka dalam penyelenggaraan pelayanan.
- e. Tidak diskriminatif adalah prinsip yang mengharuskan pelayanan publik untuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, status sosial, atau ekonomi masyarakat.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban mengacu pada pemberian pelayanan publik yang memastikan bahwa hak dan kewajiban dari pihak yang memberikan pelayanan dan yang menerima pelayanan dijaga seimbang.

Dalam penelitian ini, SBMI Lampung Timur adalah sebuah organisasi publik non-pemerintah yang berupaya mengurangi perdagangan orang dan perempuan Indonesia ke luar negeri melalui pemberian layanan.

### **2.2.2 Jenis Organisasi Publik**

Organisasi publik ialah suatu kelompok orang atau individu yang bekerjasama secara terstruktur yang memiliki tujuan tertentu. Organisasi ini terbentuk dalam berbagai ukuran seperti perusahaan, institusi, organisasi nirlaba, serta

kelompok sosial. Berikut ini jenis atau tipe organisasi menurut Mahsun dalam Sastrawan, (2023):

- a. Pure profit organization merupakan organisasi yang mempunyai tujuan dalam penyediaan barang dan atau jasa dengan maksud mendapatkan laba sebanyak-banyaknya sehingga bias dinikmati oleh para pemilik, dalam pendanaan yang berasal dari investor.
- b. Quasi profit organization yang bertujuan dalam penyediaan barang atau jasa untuk memperoleh laba serta mencapai sasaran sebagaimana sesuai dengan rencana para pemilik.
- c. Quasi non profit organization ialah organisasi dengan tujuan dalam penyediaan barang atau jasa dengan tujuan untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan.
- d. Pure non profit organization ialah organisasi yang bertujuan untuk penyediaan barang atau jasa dengan tujuan untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan jenis organisasi diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan organisasi ditentukan dalam tujuan organisasi dalam mencari keuntungan atau memberikan pelayanan untuk masyarakat. Dalam penelitian ini SBMI Lampung Timur termasuk dalam jenis organisasi pure non profit organization, karena memiliki persamaan dalam jenis tujuan organisasi, dimana SBMI Lampung Timur merupakan organisasi yang bertujuan menyediakan layanan untuk masyarakat tanpa mencari keuntungan dan memberikan tenaga secara sukarela.

### **2.3 Organisasi Non Pemerintah (NGO)**

Organisasi Non Pemerintah merupakan *Non Government Organization (NGO)*. Dimana organisasi ini didirikan oleh perorangan atau kelompok yang memberikan layanan kepada anggotanya atau masyarakat lain secara sukarela dan tidak mengharapkan keuntungan dari kegiatannya.

Menurut Budi Setyono dalam Chandra (2018), NGO ialah suatu lembaga atau organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang

memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. NGO dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi. Jenis organisasi ini diyakini dapat memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik-pemerintah maupun swasta (*private sector*), sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut.

Organisasi Non Pemerintah (NGO) memainkan tiga jenis peranan yang sangat penting, yaitu:

1. Mendukung ialah kegiatan memberdayakan masyarakat pada tingkat sosial dimana membantu dalam penanganan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan pengaruh politik membangun jejaring ke jangka lebih luas baik nasional maupun internasional.
3. Ikut serta dalam membangun perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah memiliki perangkat hukum yang berlaku meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perangkat hukum lainnya ialah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM. Organisasi non pemerintah atau NGO dijadikan wadah alternatif dalam melaksanakan perpindahan dengan menyusun dan memproduksi ide-ide kreatif, inovatif dan strategis yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, dan individu.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Organisasi Non Pemerintah atau dapat juga disebut (NGO) adalah kelompok masyarakat yang memiliki aspirasi dan kegiatan bersama yang dijalankan secara sukarela yang kerjasamanya dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan organisasinya tanpa mengharapkan keuntungan.

## **2.4 Tinjauan tentang Strategi**

### **2.4.1 Pengertian Strategi**

Strategi ialah suatu alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Menurut David (2011), strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.

Menurut Tjiptono (2006), strategi ialah suatu seni atau ilmu yang berartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan pada organisasi dalam mempersiapkan organisasinya dalam pencapain tujuan. Sedangkan menurut Rangkuti (2013), mengungkapkan bahwa strategi ialah rencana yang komprehensif perusahaan dalam mempersiapkan pencapaian tujuan yang telah dibuat sebelumnya.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya strategi merupakan suatu cara, sebuah tindakan atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dalam kurun waktu yang panjang untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Strategi juga selalu berkaitan dengan tiga hal yaitu: Tujuan, sarana dan cara. Oleh karena itu, strategi harus didukung dengan kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada dalam melaksanakan fungsi perannya di dalam mengatasi perdagangan orang yang terjadi pada pekerja migran asal lampung Timur. Pemerintah haruslah lebih tanggap untuk memberikan upaya dalam mengatasi perdagangan orang.

### **2.4.2 Peranan Strategi**

Di dalam lingkup organisasi strategi sangat penting dalam kemajuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Strategi juga memiliki banyak peranan penting dalam berlangsungnya suatu organisasi. Adapun 3 peranan dalam strategi ialah sebagai berikut:

- a. Strategi berperan untuk mendukung organisasi dalam mengambil keputusan sebagai unsur untuk mencapai tujuan.

- b. Strategi berperan sebagai sarana berkoordinasi dalam hubungan untuk berkomunikasi ke semua arah dalam organisasi.
- c. Strategi berperan sebagai pencapaian target dengan sebuah misi dan visi sebuah organisasi untuk menentukan pencapaian yang akan datang.

Berdasarkan peranan di atas diungkapkan bahwa strategi dapat berperan sebagai target organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebuah organisasi. Adanya jaminan organisasi dapat berjalan dilihat dari adanya strategi yang dibuat oleh organisasi tersebut.

### **2.4.3 Fungsi Strategi**

Menurut Assauri (2013), terdapat enam fungsi yang dapat dijalankan oleh organisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Hubungan sebuah visi yang menjadi tujuan, strategi dirumuskan sebagai tujuan untuk memperoleh target. Perlu adanya suatu komunikasi untuk mengetahui dan mengembangkan nilai alternatif untuk menyesuaikan organisasi dengan faktor lingkungan.
- b. Menghubungkan kekuatan organisasi dengan keunggulan organisasi agar menjadi peluang dalam lingkungan.
- c. Memanfaatkan keberhasilan yang telah dicapai untuk menjadikan peluang dimasa depan.
- d. Menghasilkan sumberdaya yang telah digunakan agar dapat membangkitkan sumberdaya yang belum terwujud.
- e. Berkoordinasi untuk mengarahkan kegiatan sehingga aktivitas organisasi dapat menyiapkan keputusan sesuai dengan tujuan organisasi.
- f. Adanya reaksi untuk menghadapi waktu yang akan datang, proses yang dimaksud yaitu tujuan untuk menciptakan sumber daya serta membangkitkan aktivitas pendukungnya.

## **2.5 Tinjauan tentang Manajemen Strategi**

Menurut Setiawati (2020), Manajemen strategi ialah sebuah rangkaian hasil dan aktivitas administratif dalam kinerja organisasi dalam jangka panjang. Adapun pendapat David (2011), manajemen strategis dapat diartikan sebagai seni dan

pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategis memiliki fokus pada kegiatan manajemen, informasi serta pelaksanaan lainnya yang terjadi pada perusahaan.

Wheelen dan Hunger dalam Ulfa (2018), manajemen strategi adalah seperangkat aksi dan keputusan manajerial yang menentukan performa korporasi pada jangka panjang. Manajemen strategik menyertakan pemindaian lingkungan (eksternal dan internal), formulasi strategi (strategi atau perencanaan jangka panjang), (implementasi strategi, serta evaluasi dan kontra). Pembelajaran manajemen strategi menekankan pada proses pengawasan dan evaluasi dari peluang eksternal dan ancaman pada kekuatan dan kelemahan korporasi atau perusahaan.

Manajemen strategi memiliki keterkaitan dengan ilmu administrasi negara, manajemen strategi digunakan dalam proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan dan inovasi suatu organisasi. Manajemen strategi yang ditetapkan pada organisasi non pemerintah mengarah pada tujuan. Salah satu organisasi non pemerintah yang menerapkan manajemen strategi yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung Timur.

Bentuk manajemen strategi pada Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung Timur memiliki beberapa program yang salah satunya mendampingi pengaduan kasus, baik dari pekerja migran dan atau dari keluarganya. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dalam kasus itu meliputi pada pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan. Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti kepada pihak yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan pekerja migran, baik pemerintah maupun swasta.

## **2.6 Implementasi Strategi**

Terdapat suatu pengertian tentang implementasi strategi menurut para ahli sebagai berikut: pertama menurut Salusu (2006), implementasi strategi ialah suatu perangkat kegiatan yang dijalankan atas dasar keputusan yang berproses

terarah dan terkoordinasi serta melibatkan banyak sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Adapun pendapat lain dari Amirullah (2015), bahwa implementasi strategi ialah sebuah tindakan pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber daya perusahaan melalui strategi yang telah dipilih. Suatu implementasi strategi diperlukan untuk merinci dengan tepat dan jelas bagaimana sesungguhnya pilihan strategi yang telah diambil direalisasikan. Implementasi strategi yang berhasil sangat tergantung pada keahlian dan kemampuan serta keterampilan dari implemetornya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas implementasi strategi dapat disimpulkan bahwa suatu implementasi strategi yakni rangkaian kegiatan yang mengelola, mengarahkan, mengendalikan bermacam-macam sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang tepat sasaran serta dapat dijalankan secara efektif oleh sumber daya manusianya.

### **2.6.1 Konsep Implementasi Strategi**

Implementasi strategi merupakan seperangkat kegiatan pengelola, pengarahan, pengendalian bermacam sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang tepat sasaran. Berikut ini beberapa konsep implementasi strategi menurut beberapa ahli yaitu:

- a. Konsep menurut Wheelen dan Hunger dalam Ulfa (2018), manajemen strategi dalam dimensi implementasi strategi, yaitu:

Implementasi strategi merupakan suatu proses pihak manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan pelaksanaan program, anggaran, dan prosedur.

1. Program ialah bentuk upaya dalam pelaksanaan strategi dan menjadi bagian penting dalam mengimplementasikan strategi karena adanya program untuk menjadi penunjang dalam suatu permasalahan, Menurut Wahyuni (2020), program adalah variabel penentu dalam kesuksesan implementasi strategi, didalamnya terdapat rencana dan agenda kegiatan

yang akan dijalankan oleh organisasi. Keberhasilan implementasi dilihat dari bagaimana suatu program dibuat dan dilaksanakan.

2. Anggaran berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan, dalam anggaran implementasi strategi akan menetapkan anggaran pendapatan dan anggaran beban yang akan dijalankan dalam satu program atau strategi yang akan berjalan. Masing-masing anggaran ini memiliki pengaruh dalam pencapaian kinerja strategi. Menurut Nafarin dalam Wahyuni (2020), anggaran adalah rencana tertulis yang berkaitan dengan kegiatan organisasi, dinyatakan secara kuantitatif dalam kurun waktu tertentu biasanya dinyatakan dalam satuan moneter.
  3. Prosedur dalam implementasi strategi harus ada sebuah prosedur untuk mencapai hasil dan tujuan dalam sebuah implementasi. Prosedur ialah suatu cara mengerjakan suatu pekerjaan menurut tingkatnya. Menurut Ardiyos dalam Sumaraw (2013), prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam. Prosedur pada dasarnya merupakan susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lain untuk mengarahkan pada jalannya suatu kegiatan yang berisikan langkah-langkah tertentu untuk memberikan arah dalam pelaksanaannya.
- b. Konsep implementasi strategi menurut Higgins dalam Salusu (2006), ialah tahap dalam bagian dari strategi setelah tahap perumusan strategi lalu dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan strategi dan diakhiri oleh evaluasi strategi. Implementasi dapat dikatakan dengan rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dari strategi. Kegiatan ini menyentuh seluruh jajaran manajemen, mulai manajemen puncak sampai pada karyawan paling bawah. Berikut ini beberapa hal yang mencangkup implementasi strategi menurut Higgins dalam Salusu (2006), yaitu:

### 1. Perencanaan Integral dan Sistem Pengendalian

Sasaran yang ingin dicapai oleh strategi, dijabarkan secara detail dan rinci. Menurut Robbins (2015), perencanaan antara (program) merupakan suatu penghubung antara sasaran strategi dan perencanaan operasional yang telah dibuat. Program ini mencakup ruang lingkup yang cukup luas, waktu yang memadai, cukup komprehensif dan memiliki nilai secara rinci. Perencanaan operasional ialah suatu perencanaan yang prosesnya kedalam rencana yang pasti yaitu kegiatan yang dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Anggaran yang merupakan penjabaran dari kunci keberhasilan perencanaan operasional, biasanya disebut rencana operasional keuangan dan pembiayaan dalam organisasi. Adapun pengertian sistem pengendalian yang dimaksud ialah sistem manajemen organisasi dari sebuah tujuan yang akan digarap dan menyiapkan target sasaran organisasi untuk kedepannya.

### 2. Kepemimpinan, motivasi dan sistem komunikasi

Gaya kepemimpinan memegang peranan sentral dalam menggerakkan karyawan menuju sukses. Para pelaksana strategi mampu memberikan motivasi kepada jajaran kepegawaian atau pelaksana strategi lainnya agar dapat memberikan suatu semangat dalam organisasinya, selain itu sistem komunikasi yang dimiliki dapat dianggap baik agar segera mencapai tujuan yang diinginkan.

### 3. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kultur Organisasi

Pencarian suatu strategi diutamakan dari adanya manajemen sumber daya manusia dan budaya organisasi yang berjalan. Pendapat menurut Rivai (2009), menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia ialah suatu ilmu dan seni perencanaan, pengadaan, yang memberi pengaruh dan mengarahkan tenaga kerja manusia agar dapat memberikan hasil pekerjaan secara maksimal, sehingga dapat mencapai tujuan,

- c. Certo dan Peter dalam Hari (2007), implementasi strategi harus dijalankan dengan langkah atau struktur yang jelas, berikut ini didapati langkah yang akan dilewati oleh organisasi dalam mengimplementasikan strategi yaitu:
1. Menganalisis perubahan, pada tahap ini perubahan dianggap sangat sederhana dimana perubahan dihasilkan dengan bervariasi sehingga dapat mempengaruhi misi organisasi.
  2. Menganalisis struktur organisasi, yaitu perubahan yang dibuat atas perubahan dalam implementasi yang berpengaruh terhadap perubahan struktur.
  3. Menganalisis budaya organisasi, yaitu unsur yang membuat strategi dalam suatu organisasi berpengaruh dalam perubahan organisasi.
  4. Menganalisis kepemimpinan, suatu pemimpin dengan gaya kepemimpinan sangat berpengaruh untuk menentukan sebuah keputusan organisasi. Gaya kepemimpinan untuk organisasi non profit menjadi pekerjaan bersama dan akan melibatkan banyak orang dengan peran individu yang berbeda.
  5. Implementasi, evaluasi strategi, ini ialah tahapan terakhir yang akan dijalankan sebuah manajemen dalam perubahan strategi yang telah dibuat, perubahan yang terjadi yaitu struktur organisasi, budaya organisasi, serta gaya kepemimpinan.

Berdasarkan konsep implementasi strategi di atas, maka peneliti akan menggunakan konsep implementasi strategi menurut Wheelen dan Hunger dalam Ulfa (2018). Untuk organisasi strategi sangat penting dalam kemajuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Strategi juga memiliki banyak peranan penting dalam berlangsungnya suatu organisasi, oleh karena itu strategi SBMI Lampung Timur akan dikaitkan dengan teori ini untuk melihat pencapaian tujuan dalam perjalanan SBMI Lampung Timur.

## **2.7 Perdagangan Orang**

Perdagangan orang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merujuk pada tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, tindakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, penjeratan utang, atau memberikan bayaran atau manfaat kepada orang yang mengendalikan individu tersebut. Tindakan ini dapat terjadi baik di dalam negeri maupun lintas batas negara, dengan tujuan eksploitasi atau menyebabkan individu tersebut dieksploitasi. Penyusunan Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan ancaman hukuman yang lebih berat kepada pelaku perdagangan orang daripada menggunakan KUHP yang dianggap memberikan perlindungan yang kurang memadai.

Definisi perdagangan orang menurut Pasal 3 Protokol PBB mencakup perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan individu dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya. Ini dapat mencakup penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, serta memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar bisa mendapatkan persetujuan dari individu yang memiliki kendali atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi.

Di Indonesia, ada beberapa jenis kejahatan perdagangan orang, termasuk perdagangan perempuan dan perdagangan anak. Pada umumnya, perempuan dan anak-anak menjadi korban yang sering kali menjadi sasaran karena dianggap paling rentan. Para korban perdagangan orang sering kali menjadi target penipuan, diperlakukan secara tidak manusiawi, dan dieksploitasi.

## **2.8 Pekerja Migran Indonesia (PMI)**

Berdasarkan UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa PMI atau yang sering disebut sebagai TKI adalah warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam rangka kerja untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa upah atau gaji. Dengan merujuk pada definisi tersebut, secara sederhana PMI atau TKI dapat diartikan sebagai individu yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan maksud untuk bekerja dan menerima upah atau gaji selama periode waktu tertentu.

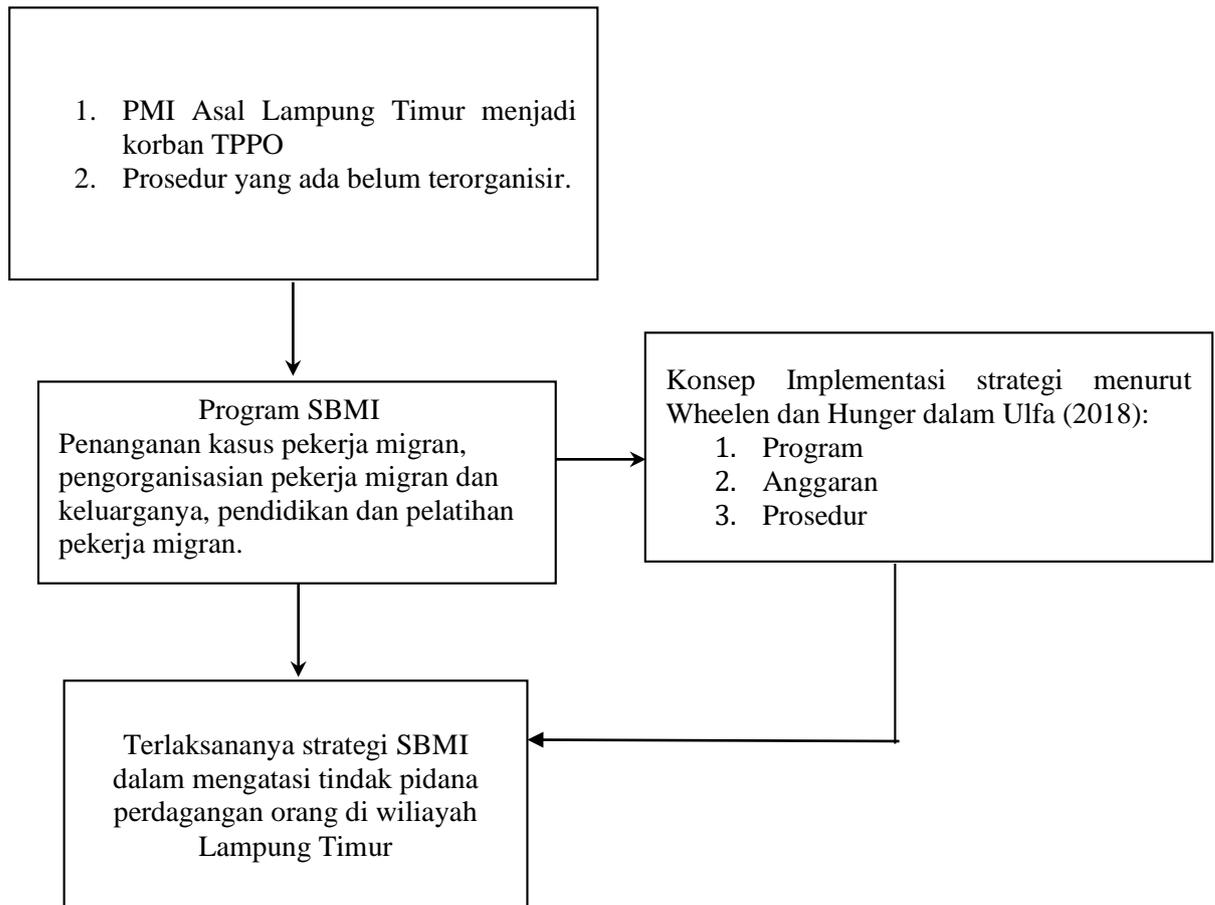
Migrasi pekerja mencakup beragam jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil hingga migran yang memiliki tingkat keterampilan yang tinggi. Dalam konteks migrasi pekerja, negara-negara asal migran sering disebut sebagai negara pengirim, sementara negara-negara yang menjadi tujuan migrasi disebut sebagai negara tujuan.

Proses keberangkatan pekerja migran dikelompokkan menjadi dua bagian yakni sesuai prosedur dan non-prosedur. Pekerja migran prosedur ialah PMI yang berangkat dengan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan non-prosedur ialah PMI yang berangkat dengan jalur persyaratan yang tidak lengkap, keberangkatan ini ialah tindakan yang menyimpang karena dianggap sebagai pelanggaran hukum keberangkatan PMI. Pemerintah maupun organisasi publik lainnya tidak bertanggung jawab atas kendalah atau masalah yang akan terjadi pada PMI.

## **2.9 Kerangka Pikir**

Dengan adanya organisasi non pemerintah yang hadir di tengah masyarakat dan memiliki visi dan misi memberikan layanan kepada anggotanya atau masyarakat lain secara sukarela dan tidak mengharapkan keuntungan dari kegiatannya. SBMI Lampung Timur pun hadir di tengah masyarakat yang merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang merupakan wujud dari kepedulian dan kontribusi dari kondisi buruk serta banyaknya permasalahan yang dialami oleh para PMI atas keterbatasan pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan oleh para PMI serta minimnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada PMI. Dengan hadirnya lembaga-lembaga non pemerintah dengan strategi dan cara kerjanya yang diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi PMI.

Tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan jumlah pengiriman pekerja migran yang dikatakan cukup banyak. Peran lembaga non pemerintah sangat dibutuhkan, agar lembaga ini semakin mampu mendorong berbagai pihak memerangi perdagangan orang yang kian meningkat ini menjadi pendorong bagi peneliti untuk mau mengetahui bagaimana implementasi strategi yang ada di lembaga non pemerintah dalam melindungi pekerja migran. Implementasi strategi ialah sebuah tindakan pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya organisasi dengan jalur strategi yang dipilih. Implementasi strategi diperlukan untuk merinci secara lebih tepat dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah dibuat, maka dari itu penelitian ini akan mengkaji implementasi strategi dari organisasi non pemerintah Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung Timur dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang pada pekerja migran asal Lampung Timur.



Gambar 2 Kerangka Pikir  
Sumber: Diolah peneliti, 2023.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti sebagai suatu disiplin ilmu untuk melakukan suatu penelitian. Metode penelitian meliputi prosedur atau suatu langkah yang akan ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan dianalisis. Berikut ini gambaran mengenai metode penelitian.

#### **3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2013), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian tentang untuk memahami subjek penelitian sebagai contoh tindakan, motivasi dengan mendeskripsikan dalam bentuk ungkapan kata-kata dengan bahasa alamia penelitian.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami, dan menjelaskan tentang bagaimana implementasi strategi yang dilakukan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung Timur dalam mengatasi perdagangan orang pada pekerja migran asal Lampung Timur.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan suatu masalah pokok yang didapatkan oleh peneliti melalui pengalaman atau kejadian yang telah dirasakan langsung selanjutnya dapat diterapkan sebagai kajian penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, fokus dalam penelitian ini yaitu implementasi strategi organisasi non pemerintah dalam mengatasi perdagangan orang pada pekerja migran asal

Lampung Timur dengan menggunakan tiga variabel implementasi strategi menurut Wheelen dan Hunger dalam Ulfa (2018), yaitu:

1. Program yang telah dilaksanakan oleh SBMI Lampung Timur serta pencapaian dalam mewujudkan strategi SBMI Lampung dalam mengatasi perdagangan orang. Program ini ialah penanganan kasus PMI, pengorganisasian PMI dan anggota keluarganya, Pendidikan dan pelatihan, Pemberdayaan PMI.
2. Anggaran ini berkaitan dengan sumber pendanaan program dalam menjalankan strategi SBMI Lampung Timur. Sumber pendanaan SBMI Lampung Timur berasal dari penyelenggaraan kegiatan atau pihak yang menyelenggarakan program untuk SBMI.
3. Prosedur yang digunakan SBMI Lampung Timur dalam penerapan strategi dan program yang diimplementasikan. Prosedur yang ada tidak dituliskan namun diselenggarakan secara langsung.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Dalam pandangan Moleong (2016), lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti menjalankan studi, khususnya untuk mengumpulkan data penelitian yang akurat. Pendekatan yang digunakan adalah dengan mempertimbangkan esensi penelitian dan melakukan eksplorasi di lapangan untuk mencari kesesuaian dengan realitas yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Pada Kantor Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung (SBMI Lampung Timur).

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini merupakan realitas dari masalah yang difokuskan, pemilihan SBMI Lampung Timur menjadi lokasi utama dalam penelitian ini. Mengingat bahwasanya SBMI adalah organisasi non-pemerintah yang turut andil dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi para pekerja migran yang mengalami permasalahan.

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data ialah suatu bentuk benda maupun hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dengan memberikan pertanyaan kepada informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung mendatangi SBMI Lampung Timur dan memberikan pertanyaan mengenai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program SBMI dalam mengatasi perdagangan orang pada pekerja migran asal Lampung Timur.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari data primer yang berbentuk file atau dokumen, arsip yang selanjutnya dikelola oleh peneliti, terutama yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan program SBMI Lampung Timur dalam mengatasi perdagangan orang pada pekerja migran asal Lampung Timur.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berhadapan secara langsung bertujuan untuk bertukar informasi dari informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada SBMI Lampung Timur terkait dengan penelitian, untuk memperoleh informasi yang mendalam dan jelas mengenai upaya yang dilakukan SBMI Lampung Timur dalam mengatasi perdagangan orang pada pekerja migran asal Lampung Timur. Informan dalam penelitian ini ialah:

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan	Subtansi
1.	Mujianto	Ketua SBMI Lampung Timur	Wawancara 13 April 2023 - Memberikan informasi gambaran umum penelitian - Memberikan media data profil Instansi - Memberikan dan menyajikan data perkembangan SBMI Lampung (Lampung Timur)
2.	Sukendar	Anggota SBMI Lampung Timur	Wawancara 22 Juli 2022 - Sebagai media informasi mengenai keberadaan dan kegiatan
3.	Budi	Anggota SBMI Lampung Timur	Wawancara 28 Mei 2023 - Sebagai media informasi mengenai keberadaan dan kegiatan
4.	Suratmi	Purna PMI	Wawancara 17 Juni 2023 - Sebagai narasumber keberadaan SBMI
5.	Tri	Calon PMI	Wawancara 17 Juni 2023 - Sebagai narasumber keberadaan SBMI
6.	Ariono	Purna PMI	Wawancara 17 Juni 2023 - Sebagai narasumber keberadaan SBMI

Sumber: Diolah peneliti, 2023

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen yang didapatkan. Dokumen yang dimaksud berupa gambar, foto yang berasal dari objek penelitian, dokumen ini menjadi pelengkap dalam wawancara dan observasi yang sedang berjalan.

Tabel 4. Dokumentasi

No.	Dokumen	Keterangan
1.	Profil SBMI Lampung	Sumber data untuk gambaran umum penelitian
2.	Laporan SBMI Lampung	Analisis pencapaian hasil penelitian
3.	Undang-undang	Sebagai Dasar Hukum penelitian UU No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia
4.	Foto Kegiatan SBMI Lampung Timur	Sebagai dokumentasi penelitian

Sumber: Diolah peneliti, 2022

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2014), teknik analisis data yang dimaksud ialah melakukan upaya dengan mengorganisasikan data, memilih data untuk dapat dikelola. Upaya yang dilakukan dapat menyimpulkan dan menentukan pola sehingga menghasilkan data yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun sebagai berikut tahapan analisis data yaitu:

- a. Reduksi data (data reduction)
 

Mereduksi data ialah suatu rangkuman untuk memilih objek serta memfokuskan pada bagian yang penting, dilihat dari tema dan polanya dengan mereduksi data melalui gambaran yang lebih jelas sehingga efektif dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data (data display)
 

Langkah selanjutnya yaitu mendisplay data dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, namun data digunakan bersifat naratif. Adanya pendisplayan data akan memudahkan pemahaman terhadap penyusunan data sehingga rencana kerja selanjutnya dapat mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification)
 

Langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan dimana hal ini bersifat hanya sementara sehingga sewaktu-waktu dapat berubah jika adanya penemuan

bukti bahwa kumpulan data tidak valid. Namun, kesimpulan dapat dianggap valid jika didukung oleh bukti yang telah dikumpulkan dari lapangan sesuai dengan data.

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2011), teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif diartikan laporan peneliti untuk menguji tingkat kepercayaan dalam hasil penelitian yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa kriteria yang diungkapkan oleh Moleong (2013), dalam pemeriksaan data, yaitu:

- a. Teknik pemeriksaan kredibilitas data ialah sebuah kriteria untuk melaksanakan tingkat kepercayaan dalam penelitian yang akan dicapai, derajat kepercayaan dari hasil penemuan akan menjadi bukti peneliti dalam kegiatan penelitiannya. Pada teknik ini derajat kepercayaan di periksa oleh teknik pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Triangulasi ialah upaya untuk menyeimbangkan kebenaran data yang diambil dari sumber lain. Adapun macam-macam dari triangulasi yaitu, triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkedudukan atau memiliki posisi yang berbeda sehingga informasi yang didapat dapat di bandingkan.
  2. Kecukupan referensial ialah dengan mengumpulkan sumber data melalui catatan, rekaman, sebagai referensi analisis dan penafsiran data. Pada penelitian ini pengumpulan informasi yang digunakan yaitu melalui dokumen, catatan, foto, dan rekaman untuk mendukung penafsiran data.
- b. Teknik pemeriksaan keteralihan data ialah adanya uraian isi dengan melaporkan hasil penelitian secara detail sehingga dapat menghasilkan analisis penelitian sesuai dengan tema yang dibawa oleh peneliti. Derajat

keteralihan dicapai melalui uraian yaitu, cermat, rinci, tebal serta adanya kesamaan konteks data.

- c. Teknik pemeriksaan kebergantungan ialah uji kebergantungan yang dilakukan terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini uji yang dilakukan mengecek apakah penelitian yang sedang berlangsung dinyatakan benar sehingga selanjutnya akan mendiskusikan hasil penelitian dengan pembimbing.
- d. Kepastian data ialah uji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian, proses yang dimaksud pengumpulan data lapangan yang berupa wawancara, dokumen, rekaman, dan foto. Uji ini dicapai dengan pemeriksaan secara cermat terhadap seluruh unsur dan proses penelitian kepada pembimbing sehingga dapat dilakukan bersama pengujian I penelitian.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan implementasi strategi organisasi non pemerintah dalam mengatasi TPPO di Lampung Timur, maka diambil kesimpulan bahwa implementasi strategi organisasi non pemerintah yaitu pada SBMI Lampung Timur dikatakan baik. Hal ini terlihat dari terlaksananya strategi SBMI Lampung Timur dan didukung dengan program yang dikatakan berhasil dalam mengurangi tingkat TPPO pada PMI asal Lampung Timur, yang dilihat dari tiga variabel yaitu bagaimana pelaksanaan program, anggaran, dan prosedur dalam penerapan implementasi strategi, SBMI Lampung Timur telah mencakup tiga hal tersebut.

#### A. Program

Program yang ada di SBMI Lampung Timur berjalan dengan baik, hal ini terlihat dengan bagaimana SBMI Lampung Timur menjalankan program yang didukung dengan kegiatan-kegiatan didalamnya, pada program penanganan kasus SBMI Lampung Timur turut membantu menyelesaikan kasus PMI yang bermasalah. Program pengorganisasian SBMI Lampung Timur melaksanakannya dengan membentuk kelompok musyawarah dengan PMI maupun anggota SBMI Lampung Timur. Pada program pendidikan terdapat kegiatan sosialisasi dimana SBMI Lampung Timur beserta anggotanya turun langsung untuk memberikan sosialisasi yang dilaksanakan bersama masyarakat, calon PMI dan purna PMI. Program yang dijalankan telah memberikan penurunan angka TPPO karena memberikan informasi untuk masyarakat dalam menghindari TPPO.

#### B. Anggaran

SBMI Lampung Timur merupakan organisasi publik dengan jenis Pure non profit organization ialah organisasi yang bertujuan untuk penyediaan barang atau jasa dengan tujuan untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana setiap program di SBMI Lampung

Timur memiliki kegiatan yang dilaksanakan hanya dengan mengandalkan anggaran dari SBMI Pusat, dan iuran anggota kelompok sebesar Rp.10.000, untuk setiap kegiatannya, karena SBMI Lampung Timur menjadi organisasi yang menaungi untuk memenuhi hak serta kewajiban PMI walaupun hanya dengan dana yang disediakan SBMI Lampung Timur tetaplah menjalankan setiap program yang ada.

#### C. Prosedur

Adapun sebuah prosedur yang digunakan SBMI Lampung Timur untuk mencapai hasil dan tujuan dalam sebuah implementasi strategi telah dilaksanakan dan dikatakan cukup baik, meskipun tidak begitu berstruktur dan tidak tertulis namun pelaksanaan prosedur mengikuti keadaan dilapangan, prosedur yang dijalankan dengan mengikuti topik masalah dari program itu sendiri.

### 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai implementasi strategi SBMI Lampung Timur ialah:

1. SBMI Lampung Timur sebaiknya mengadakan pengembangan jaringan sosial pada masyarakat terutama pada kalangan akademisi untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk kepentingan dan perkembangan.
2. Sebaiknya SBMI Lampung Timur membentuk pembukuan lebih terstruktur lagi mulai dari pembukuan kegiatan yang telah dilakukan maupun pembukuan mengenai pendanaan yang masuk, sehingga adanya arsip dalam organisasi ini.
3. Sebaiknya adanya SOP SBMI Lampung Timur secara tertulis dan terstruktur mengenai proses dalam penanganan PMI baik pengaduan maupun sosialisasi yang dibentuk dalam dokumen, sehingga adanya panduan khusus yang jelas dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., Alfian, Y., dan Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Amirullah. (2015). *Manajemen Strategik: Teori Konsep Kinerja*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Anggeraja, I. S. (2019). *Peran International Organization Of Migration Dalam Menanggulangi Human Trafficking Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, FISIP UNPAS).
- Arfa, D. (2016). *Perdagangan dan Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia*. *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya*, 18(1), 1-11.
- Arianto, J. (2017). *NGO atau LSM sebagai sarana membangun budaya politik Indonesia*. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 12(2), 1-15.
- Arifudin. (2020). *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*. Jakarta: CV Pena Persada.
- Assauri, Sofja. (2016). *Strategic Management Sustainable Competitive Advantages*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Breemer, J. (2020). *Strategi Pelayanan Transportasi Online Gojek Di Kota Kendari*. *Jpkm-Aphelion (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat-Aphelion)*, 1(01), 96-107.
- Chandra, E. (2018). *Youtube, Citra Media Informasi Interaktif Atau Media Penyimpanan Aspirasi Pribadi*. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(2), 406.
- David Fred R., dan Forest R. David. (2016). *Manajemen Strategik: Suatu pendekatan Keunggulan Bersaing konsep*. Diterjemahkan oleh: Novita Puspasari dan Liza Nurbani Puspitasari. Jakarta: Salemba Empat.
- Han, E, S., dan goleman (2019). *Peran Lembaga Strategi Nasional Sebagai Ngo/Lsm Dalam Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa (Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Lsn Yogyakarta)*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hendriawan, B. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penduduk Melakukan Mobilitas Non Permanen Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Malaysia*

- (Studi Kasus TKI Yang Pulang Di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Hari Purnomo, Zulkieflimansyah. (2007). *Manajemen Strategi*. Makassar: LPFE-UI.
- Herachwati, N. (2013). *Performance appraisal*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 23(2), 189–196.
- Husein, Umar. (2017). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indrianti, D. (2017). *Upaya National Crime Agency (Nca) Dalam Menangani Kasus Human Trafficking Di Inggris*.
- Moleong, Lexy J (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muflichah, dan Bintoro, R. W. (2009). *Trafficking: Suatu Studi tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas*. Jurnal dinamika hukum, 9(2), 155-168.
- Nur Hidayanti. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI)*. Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 13 No. 3. Semarang: Politeknik Negeri Semarang. Hal. 209
- Nurkusuma Wardani, *Jurnal Ilmiah Trafficking Perempuan dan Anak*, Hlm.2
- Oktariyanda, T. A., A p, S., & A p, M. Ilmu, S., Negara, A., Publik, J. A., Ilmu, (2001). *Manajemen Strategi Program Pelita Si Abah (Pemanfaatan Limbah Tahu Sebagai Alternatif Bahan Bakar Murah dan Ramah Lingkungan) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Alhandi Buditama*. 1–14.
- Putra, M. R. E., Rachmawati, I., & Mulyadi, A. (2020). *Strategi Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi Dan Pajak Daerah*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 714–727.
- Rangkuti. (2013). *Analisis SWOT. Teknik membeda kasus*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Riski, Pindo. (2017). *Partisipasi Civil Society Dalam Upaya Pemberdayaan eks Buruh Migran Indonesia Asal Lampung (Studi Pada Serikat Buruh Migran Indonesia Asal Lampung)*. Skripsi Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Salusu, J. (2006). *Pengambil keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sastrawan, P. (2023). *Lembaga Filantropi Sosial di Indonesia (Review Terhadap kajian Manajemen Strategis Organisasi Publik di Lembaga Filantropi Sosial)*. Skripsi Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung.

- Setiawan, J. (2022). *Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada Polresta Kota Bandar Lampung)*. Skripsi Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sumarauw, M. F. (2013). *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Akuntansi Atas Pembayaran Klaim Asuransi Kesehatan Pada Pt. Askes (Persero)*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3).
- Suroto, (2015). *Konsep Masyarakat Madani di Indonesia dalam Masa Postmodern (Sebuah Analisis Kritis)*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Vol 5, No 9 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
- Syafriansyah, M. (2015). *Analisis sistem dan Prosedur pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam sentosa di Samarinda*. E-Journal Ilmu Administrasi Bisnis, 3(1), 83-93.
- Tapoona, A. (2016). *Strategi Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) "Migrant Care" Dalam Penanganan Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Korban Human Trafficking*. Yogyakarta.
- Tjiptono, Fandy. (2008). *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Ulfa,S,L. (2018). *Strategi revitalisasi posyandu dalam pengembangan fungsi dan kinerja posyandu di UPTD puskesmas sandar angin kelurahan rebatinggi kecamatan dempo utara kota pagaralam*. Skripsi Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Umar, Husein. (2010). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, Tentang Perlindungan Pekerja Migran.
- Wahyuni, S., & Khaidir, A. (2020). *Implementasi Strategi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif di Kota Sawahlunto*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 2(4), 20-27.
- Walidah, A. (2016). *Strategi Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Bank Btpn Umk Mitra Usaha Rakyat Cabang 10 Ulu Di Palembang (Skripsi) (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang)*.
- Wirajati, C. (2019). *Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Organisasi Non Pemerintah Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Cagar Budaya*. (Doctoral dissertation).

Yunda, A. (2020). *Upaya Indonesia Dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking Di Selat Malaka*. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 1(3), 177-201.

Yunus, Eddy. (2016). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: penerbit Andi.

### **Sumber website**

Laporan Pengolahan Data BP2MI Per 18-04-2019. Diunduh melalui situs [www.bnp2tki.go.id](http://www.bnp2tki.go.id) diakses pada 20 Desember 2020 pukul 13.40 WIB.

<https://rri.co.id/bandar-lampung/kota-bandar-lampung/1091349/tkw-asal-lampung-selatan-dikabarkan-disiksa-majikan-di-malaysia>. Di Akses pada 12 Januari 2022

<https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/terima-pengaduan-kepala-bp2mi-minta-lanjutkan-penanganan-kasus-tppo-pmi-asal-lampung>. Di akses 10 Oktober 2022

<https://m.lampost.co/berita-500-pekerja-migran-asal-lamtim-berangkat-ke-luar-negeri-lewat-jalur-ilegal.html> Di akses 10 Oktober 2022

<https://kupastuntas.co/2021/10/24/pekerja-migran-asal-lampung-per-oktober-2021-capai-3133-orang> Di akses 10 Oktober 2022

<https://lampung.tribunnews.com/2022/01/03/2021kekerasan-perempuan-dan-anak-di-lampung-ada-239-kasus> Di akses 10 Oktober 2022

<https://lampungtimurkab.bps.go.id/indicator/12/33/1/jumlah-penduduk-lampung-timur-berdasar-kecamatan.html> Access Time: May 9, 2023, 9:18 am

[lampung.bps.go.id](http://lampung.bps.go.id), (diakses 09 Mei 2023).

<http://sbmi.or.id/tentang-sbmi>/diakses pada 23 Januari 2023 pukul 14.50 WIB).